

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dipergunakan selaku rujukan untuk peneliti ketika melangsungkan riset hingga peneliti bisa memperbanyak teori kajian yang dipergunakan pada riset yang dilaksanakan. Di bawah ini sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan riset ini, yakni :

##### II.1.1 “Implementasi Visual Guidelines Kampanye Gernas Bbi 2021 (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia) Dalam

##### Mendukung Daya Beli Produk Umkm Pada E-Commerce”

ditulis oleh Pungky Febi Arifianto, M.Sn Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknik & Desain Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

Pandemi covid 19 sudah melemahkan beragam aspek perekonomian terlebih lagi yang berkutut di bidang UMKM. Hal itu sendiri merupakan salah satu penurunan kemajuan ekonomi Indonesia yang berkontraksi sebanyak 5,32% di triwulan kedua tahun 2020. Guna mengentaskan hal itu sendiri presiden Indonesia yang dibantu oleh kerjasama lintas Kementerian berusaha<sup>4</sup> mengkampanyekan hal-hal yang bisa menaikkan daya tarik serta daya beli produk lokal buatan Indonesia. Kampanye itu sendiri ialah tema besar lanjutan dari serangkaian HUT RI ke 75 yaitu gerakan

---

<sup>4</sup> Pungky Febi Arifianto. “Implementasi Visual Guideliness Kampanye Gernas BBI 2021 Dalam Mendukung Daya Beli Produk UMKM Pada E-Commerce.” Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/2924>. Akses 26 September 2022

nasional bangga buatan Indonesia yang lalu dikenal selaku Gernas BBI.

Kementerian pariwisata dan Ekonomi kreatif, Gernas BBI dirancang *visual guideline* untuk memberi komunikasi visual yang seragam guna dipergunakan oleh platform pembelian online untuk membantu pemasaran produk lokal milik industri yang merasakan dampak pandemi terlebih lagi UMKM yang terdapat di Indonesia. Identitas visual itu sendiri berbentuk perancangan logo, perangkat grafis, palet warna dan pemakaian tipografi. Namun hal yang disayangkan ialah penerapan identitas visual gernas bbi 2021 di sejumlah platform pembelian online diselaraskan *dengan key visual* dari platform pembelian online itu sendiri. Hal tersebut membuat rancangan yang setiap e-commerce buat tidak sejalan dengan *visual guideline* yang Kemenparekraf buat.

### II.1.2 “Gerakan Bangga Buatan Indonesia: Dukungan Bagi Kebangkitan UMKM Lokal Di Masa Pandemi Covid-19” ditulis oleh Ratna Kartika Sari. Universitas Bina Sarana Informatika.

Riset kualitatif ini ditujukan guna mengetahui implementasi, berbagai pihak yang memberikan dukungan serta dilibatkan dan seperti apa gerakan tersebut bisa mendorong dalam pengentasan UMKM lokal dari kolaps serta mengembalikan kejayaan mereka selaku elemen yang menopang ekonomi negara. Gernas bbi bisa dilaksanakan secara baik dikarenakan didukung oleh beragam elemen dimulai dari lembaga pemerintahan serta jajaran BUMN, korporasi swasta, instansi profesi, platform pembelian, UMKM

serta masyarakat Indonesia yang mengambil peranan aktif untuk membeli serta mempergunakan berbagai produk lokal.<sup>56</sup>

Sarana pembelanjaan dari yang Tian lengkap serta tidak sulit diakses memberikan kesempatan untuk pasar-pasar terbaru di berbagai belahan Indonesia dalam memasuki serta ikut serta di beragam faktor pembelajaran ternama. Teknologi digital yang bertransformasi diharap bisa menjadi penyambung atas ketimpangan antara keperluan masyarakat sekarang yang kian kompleks dengan kapabilitas UMKM memberi pelayanan bagi pemenuhan keperluan itu sendiri, terlebih lagi lewat aktivitas transaksi secara daring

### II.1.3 “Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi” ditulis oleh Krisnawan Gumilar Putra Rahayu. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Pemerintah telah melaksanakan upaya peningkatan UMKM di masa pandemi melalui program Undang-undang Cipta Kerja, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Dalam hal ini, Penulis mengkaji apakah dari upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya untuk UMKM bisa meningkatkan kinerja pada saat pandemic. Dalam hal lapangan seperti kasus yang diteliti oleh Penulis bahwa Pemerintah belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terhadap UMKM yang ada di daerah, sehingga para

---

<sup>6</sup> Ratna Kartika Sari. “Gerakan Bangga Buatan Indonesia : Dukungan Bagi Kebangkitan UMKM Lokal di Masa Pandemi Covid-19.” Vol.6 No.3 (Agustus, 2021). Universitas Bina sarana Informatika. Akses Tanggal 28 September 2022

pelaku UMKM banyak yang belum mengetahui sepenuhnya tentang program yang telah disediakan oleh pemerintah.

Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) kegiatan ini diharap bisa mendorong dalam mengurangi PHK di UMKM. Ketika menyalurkan anggaran pen atau dukungan UMKM secara khusus, pemerintah mesti menjamin bahwasanya dana dukungan bisa tersalur dengan tepat serta cepat. Problematika yang dihadapi sekarang ialah integrasi data UMKM yang tersedia. Gernas bbi Pada program ini merupakan program yang menjanjikan terhadap UMKM sebagian, karena tidak semua Pelaku usaha UMKM mengerti akan platform digital ini, maka dari itu Pemerintah khususnya Kementerian terkait yang menaungi UMKM ini mensosialisasikan atau melakukan pelatihan terhadap UMKM.<sup>7</sup>

#### II.1.4 **“Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Peningkatan Kualitas SDM”** ditulis oleh Dewi Shinta Wulandari Lubis. Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia.

Sebagian besar sektor dalam perekonomian mengalami ketidakstabilan pada saat pandemi. Salah satu sektor yang mengalami ketidakstabilan tersebut adalah sektor UMKM. Pemerintah telah membuat beberapa program untuk menyelesaikan masalah dari dampak yang diterima saat pandemi, salah satu program pemerintah itu adalah program Pemulihan Ekonomi

---

<sup>7</sup> Krisnawan Gumilar Putra Rahayu. "Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi." Vol.2 No.2.(2022). Universitas Islam Bandung.  
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2576>. Akses Tanggal 28 September 2022

Nasional yang dimana merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor UMKM. Permasalahan tetap ada seperti masih tingginya tingkat pengangguran akibat pandemi. Salah satu strategi yang dapat diusulkan oleh peneliti dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini melalui peningkatan kualitas SDM sebagai stimulus yang diberikan untuk para UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode studi perpustakaan dan kualitatif untuk melahirkan interpretasi guna menangkap arti yang lebih dalam dengan mengelaborasi literatur akan pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Strategi yang ditekankan oleh peneliti seperti strategi peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini berpendapat bahwa fokus kepada peningkatan kualitas SDM dalam hal pendidikan dan pelatihan merupakan pilihan yang tepat untuk tetap bertahan dan bangkit dalam masa Pandemi Covid 19 dan UMKM akan mampu bersaing dan tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Dewi Shinta Wulandari Lubis. "Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Peningkatan Kualitas SDM". Juli 2022. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek/article/download/242/190>. Akses Tanggal 14 Januari 2023

**II.1.5 “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”** ditulis oleh Muhammad Al Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sangat berbahaya, tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tetapi juga berbahaya bagi perekonomian negara. Seluruh pihak seperti Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat mencoba bagaimana memulihkan perekonomian negara yang salah satunya melalui perbankan dan keuangan mikro islam atau biasa disebut perbankan syariah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi mudharabah untuk kegiatan usaha masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 secara syariah Perbankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari buku, dan artikel. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk pembiayaan mikro syariah dapat memulihkan usaha masyarakat agar dapat meningkat dan pulih setelah menghadapi pandemi covid.

Hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan di perbankan syariah dapat menunjang pemulihan ekonomi Nasional dan bisa menjadi salah satu solusi untuk pelaku<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Al Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. 2021. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>. Akses tanggal 16 Januari 2023

usaha UMKM untuk keluar dari permasalahan ekonomi akibat terdampak pandemi. Salah satu pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah mudharabah dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, pembiayaan dengan akad mudharabahh dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia, serta pembiayaan dengan akad mudharabah juga dapat memberikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi yang bagus.

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pungky Febi Arifianto	“Implementasi Visual Guidelines Gernas BBI 2021 (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia) Dalam Mendukung Daya Beli Produk Umkm Pada E-Commerce”	Kualitatif	Dari hasil analisis yang didapat dengan cara identifikasi tanda visual yang ada pada sampel e-commerce menunjukkan tidak sesuainya desain dengan Visual guidelines yang dibuat Kemenparekraf sehingga menjadi kekacauan visual. Hal tersebut menandakan bahwa kurangnya sosialisasi penggunaan visual guidelines kepada e-commerce dan pemerintah selaku pemangku kepentingan.
2.	Ratna Kartika Sari	“Gerakan Bangga Buatan Indonesia: Dukungan Bagi Kebangkitan UMKM Lokal Di Masa Pandemi Covid-19”	Kualitatif	Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan nasional yang bertujuan membantu mengangkat UMKM dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Penerapannya kini memasuki tahun kedua dan dinilai sukses dengan hasil memuaskan, melampaui target yang telah ditetapkan. Kesuksesan Gernas BBI dapat diraih berkat kolaborasi yang baik diantara jajaran kementerian dan BUMN, perusahaan swasta, lembaga/organisasi profesi, beberapa marketplace ternama di Indonesia, UMKM itu sendiri, dan masyarakat umum.



No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Krisnawan Gumilar Putra Rahayu.	"Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi"	Yuridis-Normatif	Pemerintah telah melaksanakan upaya peningkatan UMKM di masa pandemi melalui program Undang-undang Cipta Kerja, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Sosialisasi pada UMKM dilakukan karena usaha inilah yang langsung terjun ke perekonomian masyarakat dengan melakukan bimbingan ataupun pelatihan kepada pelaku UMKM. Tak hanya itu, Pemerataan hak untuk seluruh UMKM agar mendapat bantuan dari pemerintah.
4.	Dewi Shinta Wulandari Lubis	"Strategi Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Peningkatan Kualitas SDM"	Kualitatif Deskriptif	Salah satu strategi yang digunakan sebagai bentuk pemulihan ekonomi yaitu melalui peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini berpendapat bahwa fokus kepada peningkatan kualitas SDM dalam hal pendidikan dan pelatihan merupakan pilihan yang tepat untuk tetap bertahan dan bangkit dalam masa Pandemi Covid 19 dan UMKM akan mampu bersaing dan tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian di Indonesia.
5.	Muhammad Al Ikhwan Bintarto dan Yudi Setiawan	"Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19"	Kualitatif	Pembiayaan di perbankan syariah dapat menunjang pemulihan ekonomi nasional dan bisa menjadi salah satu solusi untuk pelaku usaha UMKM untuk keluar dari permasalahan ekonomi akibat terdampak pandemi. Salah satu pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah mudharabah dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, pembiayaan dengan akad mudharabahh dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia



## II.2 Kajian Teori

### II.2.1 Implementasi

#### A. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Dalam teori nya Marilee S. Grindle (1980:7) menjelaskan bahwasanya implementasi ialah proses umum tindakan administrasi yang bisa ditelaah di tingkat program tertentu, dimana proses implementasi baru bisa diawali jika tujuan serta target sudah ditentukan, program kegiatan sudah disusun serta anggaran yang dibutuhkan sudah disiapkan untuk diberikan kepada target group.<sup>10</sup>

Suatu implementasi dikatakan berhasil menurut Marilee S. Grindle yakni jika implementasi di pengaruhi oleh kedua variabel yang terdiri dari isi kebijakan serta lingkungan implementasi kedua variabel ini dapat dilihat jika ditunjang oleh program akses serta project individual yang dirancang khusus menurut tujuan kebijakan. Pada isi kebijakan dilihat dari sejauh mana kepentingan kelompok sasaran serta manfaat yang target group terima dapat termuat pada isi kebijakan, dalam lingkungan implementasi dilihat dari senyawa apa perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan dari ketepatan letak suatu program, pelaksana suatu kebijakan dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Variabel isi kebijakan menurut Grindle meliputi sejumlah parameter yakni :

1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;

---

<sup>10</sup> Merielle S. Grindle (1980). " *Politics and Policy Implementation in the Third World*". New Jersey: Princeton University Press Gkartzios

- 2.) Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- 3.) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan;
- 4.) Letak pengambilan keputusan;
- 5.) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
- 6.) Dukungan oleh sumber yang dilibatkan.

### **B. Teori David L Weimer dan Aidan R.Vinning**

Dalam teori nya David L. Weimer dan Aidan R. Vinning menjelaskan pandangannya melalui tiga kelompok variabel yang dapat memberi pengaruh terhadap kesuksesan pada sebuah implementasi. Variabel tersebut dinilai sederhana serta berisikan aspek yang tepat dalam melaksanakan sebuah program. Berikut tiga variabel yang ada dalam teori David L. Weimer dan Aidan R. Vinning yang telah dikutip dalam buku Subarsono dalam buku “Analisis Kebijakan Publik” (2013: 103-104) :

- 1.) Logika dalam implementasi merupakan aspek yang dibutuhkan agar suatu kebijakan yang akan ditetapkan dapat masuk akal dan mendapat dukungan secara teoritis.
- 2.) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
- 3.) Kemampuan implementor dapat dilihat dari keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan atau program.

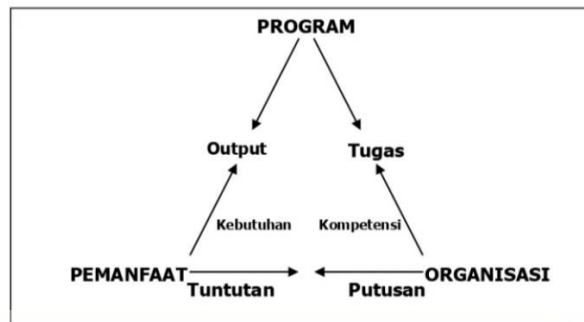
### C. Teori David C. Korten

Dalam teori yang diungkapkan oleh David C. Korten yang menjelaskan bahwa dalam model implementasi ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran atau dapat dikenal dengan model kesesuaian pada implementasi program. Menurut nya suatu penelitian akan berhasil jika terdapat tiga elemen ini di dalamnya yaitu <sup>11</sup>

1. Kesesuaian pada program dengan pemanfaatannya yaitu antara apa yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan nya dapat sesuai dengan memperhatikan beberapa aspek seperti tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran dan strategi .
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dapat dilihat dari kesesuaiannya pada tugas yang diberikan dengan organisasi pelaksana. Unsur-unsur yang harus ada dalam kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu : kognisi terkait pemahaman dan pengetahuan, arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak, intensitas dari respon pelaksana
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, dapat dilihat dari syarat yang diputuskan organisasi untuk memperoleh output program. (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2008).

---

<sup>11</sup> Subarsono.(2013: 103-104). *"Analisis Kebijakan Publik."* Yogyakarta : Pustaka Pelajar



(David C. Korten, 1988:11)

Gambar II.2.1 Model Kesesuaian Implementasi Program David C Korten  
 Sumber: Akib & Tarigan, 2008

12

## II.2.2 Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan Gerakan Nasional yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan terkait terputuknya UMKM lokal di masa pandemi Covid. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan yang dicanangkan dan telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada Mei Tahun 2020 yang lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 8 September 2021.

Diluncurkannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini menjadi upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi di Indonesia dengan mengembangkan skema onboarding dengan target mencapai 30 Juta UMKM pada tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Tim Gernas BBI berfokus

<sup>12</sup> Akib, Header., & Tarigan, Antonius. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya." Jurnal Kebijakan Publik. Jakarta

pada peningkatan jumlah UMKM dan IKM yang dapat masuk dalam ekosistem digital; peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal; dll.

Selama penyelenggaraannya, Gernas BBI memiliki dampak sangat signifikan bagi perekonomian pelaku usaha, dan tentu saja perekonomian nasional yang terdampak pandemi. Dampak Gernas BBI sangat signifikan pada penjualan produk buatan Indonesia. Berdasarkan data Hari Belanja Nasional (Harbolnas), total nilai transaksi penjualan produk lokal pada 2020 meningkat sangat pesat. Dengan giatnya kampanye Gernas BBI, maka dampak nyata dapat terwujud, yaitu UMKM tidak hanya sekedar go online, tetapi transaksi penjualan mereka juga meningkat.

Gerakan ini pula memacu masyarakat sebagai pelanggan agar semakin bangga mengonsumsi serta mempergunakan produk buatan dalam negeri. Melalui #BanggaBuatanIndonesia, diharap dapat menjadikan Indonesia semakin lekas pulih dari keadaan sulit karena pandemi. Kemajuan teknologi digital telah sangat menjanjikan, tidak terkecuali untuk para pelaku bisnis UMKM. Dimana potensi yang sektor digital tawarkan pada UMKM dan pelaku ekonomi lain sangatlah besar dengan melibatkan platform digital seperti e-commerce yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi sektor mikro di Indonesia.



Gambar II.2.2. Logo Bangga Buatan Indonesia.

Sumber : <https://www.masvian.com/2020/12/download-logo-bangga-buatan-indonesia.html?m=1>



Gambar II.2.2 Struktur Tim Gernas BBI berdasarkan Kepres No.15 Tahun 2021<sup>13</sup>

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

### II.2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan jenis usaha satuan terkecil dari motor penggerak tatanan perekonomian Indonesia. Meskipun begitu, UMKM memiliki peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia. Tercatat sampai saat ini UMKM yang ada di Indonesia mencapai 64 juta yang terdiri dari berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, pengolahan SDA (sumber daya alam), jasa maupun komunikasi. Hal ini diperkuat dengan Data BPS bekerja sama dengan KemenkopUKM pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 62 juta UMKM yang ada di Indonesia memiliki peran dalam menyumbang PDB sebanyak 60%. Selain itu jenis UMKM juga membuka peluang tenaga kerja sebesar 98% atau setara dengan 117 juta pekerja di seluruh Indonesia (Tim Indonesiabaik.id, 2020).

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengertian usaha mikro ialah upaya produktif milik seseorang atau lembaga bisnis perorangan yang telah sesuai dengan kriteria sebagai usaha mikro seperti yang tertuang pada UU. UMKM merupakan jenis usaha yang termasuk dalam usaha ekonomi produktif yang didirikan secara mandiri atau individual maupun badan bisnis yang bukan menjadi anak korporasi dari usaha menengah ataupun besar serta telah sesuai dengan kriteria usaha kecil seperti yang diatur pada UU.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008



Indonesia yang mengalami pandemi covid-19 dalam beberapa tahun ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada sektor UMKM di Indonesia. Terpuruknya sektor UMKM sangat dirasakan dari segi supply maupun demand selama masa pandemi ini, karena adanya aturan pemerintah untuk membatasi interaksi satu sama lain inilah yang membuat perubahan perilaku terjadi di masyarakat seperti kebiasaan membeli kebutuhan rumah tangga ataupun belanja yang tadinya dilakukan secara offline menjadi online.

Perubahan perilaku masyarakat selama pandemi ini memuat tren e-commerce di Indonesia sangat meningkat pesat, dimana masyarakat akan cenderung memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti membeli bahan makanan, produk kesehatan, produk kecantikan, dan baju melalui saluran online. Hal ini membuat pelaku ekonomi berusaha untuk memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan di berbagai daerah dengan harapan dapat meningkatkan penjualan produk di e-commerce tersebut. Dalam Penelitian (Hardilawati, 2019) dan (Setyorini et al. 2019) menyimpulkan bahwa e-commerce memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pemasaran dan pendapatan UMKM.

Walaupun UMKM sebagai pelaku ekonomi yang dapat memberikan sumbangan besar kepada perekonomian nasional namun dibalik hal tersebut sektor ini masih perlu banyak perhatian pemerintah agar dapat lebih kuat menyongsong perekonomian negara. Untuk itu perlunya diadakan pelatihan dalam menghadapi suatu permasalahan seperti tingkat digitalisasi yang

masih rendah, ditambah dengan kesulitan dalam mengakses teknologi dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis.(OECD,2020). Pelaku UMKM juga dituntut untuk dapat mengkomunikasikan produk secara intensif dengan melakukan pemasaran produk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk dapat menjangkau konsumennya secara langsung.<sup>15</sup>

#### **II.2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Pendirian badan usaha milik desa (Bumdes) bertujuan utama bagi peningkatan kemakmuran masyarakat lewat potensi sumber daya yang tersedia di desa. Bumdes memiliki peran penting yaitu memberi peningkatan terhadap pendapatan asli Desa serta mendorong masyarakat desa pada perencanaan serta pengelolaan ekonomi Desa. Selain itu dengan didirikannya bumdes ini memiliki target yakni masyarakat desa yang terlayani pada pengembangan usaha ekonomi produktif dan ketersediaan berbagai media bisnis pada peningkatan kemakmuran serta ekonomi masyarakat desa.

BUMDes selaku instansi hukum, didirikan harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan serta sejalan dengan persetujuan yang masyarakat desa setuju dan diselaraskan dengan potensi serta sumber daya maupun karakter lokal yang ada di desa. Bumdes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

---

<sup>15</sup> Wan Laura Hardilawati."Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". (2020). Universitas Muhammadiyah Riau. Akses Tanggal 28 September 2022

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015, pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;<sup>1617</sup>
6. Membuka lapangan kerja;

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015

<sup>17</sup> Google. "Tujuan Pendirian BUMDES". [www.Kemeteriandes.go.id](http://www.Kemeteriandes.go.id)

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sebagai organisasi atau lembaga publik yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi Desa, pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara transparan, profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dengan Organisasi Pemerintahan Desa. Keberadaan BUM Desa secara hukum didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa harus berorientasi pada:

1. Kepemilikan bersama (Pemerintah Desa dan Masyarakat) untuk mendorong kemandirian ekonomi Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keikutsertaannya dalam melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut;
2. Tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, Pendapatan Asli Desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll); dan
3. Memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi masyarakat Desa serta memupuk pendapatan.

## II.2.5 Produk Unggulan Daerah

Pada usaha pembangunan ekonomi di wilayah diperlukan ketetapan regulasi pola pengembangan baik secara multisektoral ataupun sektoral. Salah satu tahap mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yaitu melalui berbagai produk potensial, unggulan daerah pada tiap sektor wilayah pada setiap provinsi. Produk unggulan daerah mengilustrasi kapabilitas wilayah untuk menciptakan nilai, menghasilkan produk, mempergunakan sumber daya dengan konkrit, memberikan peluang kerja, menghadirkan pemasukan untuk warga ataupun pemerintah serta mempunyai prospek bagi peningkatan produktivitas serta investasi, suatu produk disebut unggul apabila berdaya saing hingga berkemampuan dalam mengalahkan produk kompetitor di pasar domestik serta menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Produk unggulan daerah merupakan salah satu hasil dari identifikasi potensi ekonomi sebagai bentuk upaya dalam pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, serta memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasi daerah. Sebuah produk dapat dikatakan unggul jika memiliki daya saing yang cukup tinggi sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan diharapkan mampu menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 ialah produk baik berbentuk barang maupun layanan yang koperasi hasilkan, UMKM yang berpotensi bagi pengembangan melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang wilayah miliki baik SDA, SDM serta budaya lokal dan menghadirkan pemasukan untuk warga ataupun pemerintah yang diharap menjadi keunggulan ekonomi untuk wilayah serta masyarakat setempat selaku produk yang berpotensi dan berdesain, berdaya jual serta daya dorong menuju serta bisa masuk ke pasar global.

Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan menurut Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan terhadap satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar desa. Secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan wilayah pedesaan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki serta didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>181920</sup>

Upaya pemerintah dalam mengembangkan produk unggulan daerah yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan,

---

<sup>18</sup> Sudarsono. 2001. *"Aplikasi Tindakan Kelas"*. Jakarta:DIKTI

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018

pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Penentuan produk unggulan dapat mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Produk berasal dari potensi sumberdaya lokal, hal ini bertujuan agar sumberdaya yang ada di desa terpakai secara maksimal.

Apabila sumberdaya berasal dari luar daerah atau dari luar desa maka disarankan agar melakukan pengolahan kembali atau membuat nilai tambah yang bisa menjadikan pembeda antara produk yang didapatkan dari sumberdaya luar daerah dengan produk unggulan yang akan dipasarkan dari desa tsb.

2. Memiliki pasar yang besar sehingga produk akan mudah terjual dan menghasilkan keuntungan yang melimpah.
3. Produk dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
4. Tidak mematikan atau bertolak belakang dengan usaha yang umumnya dijalankan di desa.
5. Produk unggulan juga bisa mempertimbangkan produk yang sedang tren dipasaran.

### **II.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir ialah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah



pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono,2011).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori David C.Korten, dimana model implementasi ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran atau dapat dikenal dengan model kesesuaian pada implementasi program. Alasan peneliti menggunakan teori David C.Korten dalam penelitiannya, karena tiga elemen yang terdapat dalam teori ini dianggap sangat sesuai dengan fokus peneliti untuk mengkaji bagaimana implementasi Gernas BBI di provinsi Maluku Utara Tahun 2022. Menurut David C. Korten suatu penelitian akan berhasil jika terdapat tiga elemen ini di dalamnya yaitu :

1. Kesesuaian pada program dengan pemanfaatannya;
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi; dan
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono, 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.

## KERANGKA BERPIKIR

### Fenomena

1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM
2. Upaya pemerintah untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan UMKM
3. Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

### Landasan Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tim Gernas BBI
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Tim Fasilitasi Pelaksanaan Gernas BBI Maluku Utara Tahun 2022.
3. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Provinsi Maluku Utara Tahun 2022

### Teori Implementasi oleh David C. Korten (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12) :

1. Kesesuaian Antara Program Dengan Kelompok Pemanfaat;
2. Kesesuaian Antara Program Dengan Organisasi Pelaksana; dan
3. Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana.

### Output

Implementasi Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Maluku Utara Tahun 2022

Gambar II.3 Bagan Kerangka Pemikiran Peneliti